

MEMBANGUN DESA DARI PERENCANAAN: POTRET RKPDES JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

Aisyah Nurul Umamah

d42230653@student.polije.ac.id

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Nurlaila

d42230149@student.polije.ac.id

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Meilinda Maulidya W

d42230631@student.polije.ac.id

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Selvi Putri Rahayu

d42230636@student.polije.ac.id

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Anggi Kharisma Putri

d42230362@student.polije.ac.id

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Eki Dwi Eksanti

d42230228@student.polije.ac.id

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Prillinaya Yudhistira

prilinaya_yudhistira@polije.ac.id

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Oryza Ardhiarisca

oryza_risca@polije.ac.id

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Alamat: Jl. Mastrip Po. Box 164. Summersari, Kab. Jember, Jawa Timur

Korespondensi penulis: d42230653@student.polije.ac.id

ABSTRACT. *The formulation of the Village Government Work Plan (RKPDes) plays a strategic role in realizing participatory, transparent, and accountable village development. This study aims to analyze the process of preparing the 2024 RKPDes of Jenggawah Village by focusing on the principles of participation, transparency, selectivity, accountability, empowerment, and sustainability. Using a qualitative-descriptive method, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving three key informants: the Village Secretary, Village Treasurer, and a member of the Village Consultative Body (BPD). The results show that the RKPDes preparation process has involved community participation through village meetings and development planning forums, although budget limitations remain a major constraint in accommodating community proposals. Transparency is reflected through open deliberation forums, projected presentation of proposals, and information dissemination via the village website and public budget banners. The village government applies selective planning based on previous program evaluations and priority needs. Accountability is upheld through structured reporting of fund usage and activity implementation in accordance with regulations. Empowerment programs such as the management of Bukit Nuansa Café by the Village-Owned Enterprise (BUMDes) have increased village income and expanded employment opportunities. Annual evaluations support program sustainability, although further improvements are required in community participation and apparatus capacity. These findings highlight the importance of good village governance in RKPDes formulation and provide practical recommendations for strengthening village development planning.*

Keyword: Village Development Planning, RKPDes, Participation, Transparency, Accountability, Good Governance, Empowerment.

ABSTRAK. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyusunan RKPDes Desa Jenggawah Tahun 2024 dengan fokus pada prinsip partisipasi, transparansi, selektivitas, akuntabilitas, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi dengan melibatkan tiga informan kunci, yaitu Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan anggota BPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKPDes telah melibatkan masyarakat melalui Musdes dan Musrenbangdes, namun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam realisasi usulan. Transparansi diwujudkan melalui forum terbuka, proyeksi usulan, serta publikasi informasi melalui website desa dan banner APBDes. Pemerintah desa juga menerapkan prinsip selektif berdasarkan evaluasi program tahun sebelumnya dan urgensi kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas tercermin melalui pelaporan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan regulasi. Program pemberdayaan seperti pengelolaan Bukit Nuansa Cafe oleh BUMDes meningkatkan PADes dan membuka lapangan kerja. Evaluasi tahunan menjadi fondasi keberlanjutan program, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam penyusunan RKPDes serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi desa dalam konteks perencanaan pembangunan.

Kata Kunci: RKPDes, Perencanaan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance.

PENDAHULUAN

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada desa untuk mengatur kepentingan masyarakat secara mandiri. Dalam kerangka tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi dokumen perencanaan tahunan yang mengoperasionalkan RPJM Desa. Penyusunannya mengacu pada Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. RKP Desa disusun melalui Musrenbangdes pada bulan Juli dan ditetapkan melalui Peraturan Desa paling lambat akhir September. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKP Desa masih menghadapi masalah. Kapasitas perangkat desa yang rendah, minimnya partisipasi masyarakat, hingga ketidaksesuaian dengan perencanaan tingkat kabupaten menjadi faktor penyebab utama¹. Selain itu, lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi membuat banyak program tidak terukur hasilnya². Namun, penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana desa merancang RKP Desa ketika berhadapan dengan keterbatasan anggaran, tuntutan program pusat, dan aspirasi masyarakat yang terus meningkat.

Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember memiliki luas 919,728 hektar dan penduduk 17.403 jiwa (BPS, 2024). Penyusunan RKP Desa Tahun 2024

¹ I Made Hendra Setiawan and Ni Ketut Rasmini, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Pegawai Pada Kualitas Laporan Keuangan," *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 5 (2021): 1331, <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p19>; Salma Dzalika Rahmadya and Dani Sugiri, "Efektivitas Musrenbangdes Dalam Penyusunan RKPDes : Studi Kasus Pada Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung" 5, no. 2 (2022): 53–59, <https://doi.org/10.35326/jiam.v5i2.1281>; Dimas Ivan Cahilla Pratama and Muhammad Farid Ma'ruf, "Analisis Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2022," *Publika*, 2023, 2243–56, <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2243-2256>.

² Kowam Syaiful Kalam, "Monitoring Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kasesirejo Kecamatan Bodeh," 2023.

menghadapi tantangan berupa berkurangnya Dana Desa, munculnya program prioritas baru seperti BLT-DD, ketahanan pangan, dan pencegahan stunting, serta banyaknya aspirasi masyarakat yang mencapai 20 usulan program pada Musrenbangdes. Situasi ini membuat pemerintah desa harus menyeimbangkan regulasi, efisiensi anggaran, kebijakan supra desa, dan kebutuhan masyarakat. Laporan anggaran tahun sebelumnya juga menunjukkan pelaksanaan program yang belum optimal, sehingga diperlukan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan kelayakan program yang direncanakan ³.

Analisis terhadap RKP Desa Jenggawah penting dilakukan untuk menilai mutu perencanaan pembangunan di tengah keterbatasan sumber daya. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah desa dalam menentukan prioritas program yang lebih tepat sasaran. Selain itu, temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi desa lain dengan kondisi serupa, serta memperkuat implementasi otonomi desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ⁴.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan RKP Desa Jenggawah Tahun 2024 dengan fokus pada aspek partisipatif, transparansi, selektif, akuntabilitas, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Secara teoritis, studi ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan desa, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Jenggawah dan panduan bagi peneliti lain dalam kajian perencanaan pembangunan desa

KAJIAN TEORI

Theory Good Governance

Menurut Abdullah, (2002) dalam ⁵ *Teori Good Governance* menjelaskan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik harus dijalankan secara responsif, transparan, akuntabel, dan partisipatif agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip – ptinsip ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dan memastikan proses pembangunan berjalan efektif serta dapat dipercaya oleh publik. *Teori Good Governance* juga menekankan keadilan , efisiensi, supermasi hukum, serta pentingnya keterbukaan informasi untuk mendukung kemajuan sosial dan ekonomi ⁶.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan *Teori Good Governance* sangat berpengaruh terhadap penyusunan dan pelaksanaan RKP Desa. Berbagai studi menemukan masalah seperti kurangnya pembinaan teknis, koordinasi yang lemah, serta keterbatasan transparansi informasi dana desa. Namun penelitian lain menunjukkan bahwa ketika prinsip – prinsip partisipasi dan akuntabilitas diterapkan dengan baik, serta efektivitas perencanaan desa meningkat Sehingga secara keseluruhan teori ini menjadi kerangka penting untuk mengontrol hubungan antara pemerintah desa

³ Supardi, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, 2023.

⁴ Lalu Maman Suryaman, Slamet Muchsin, and Retno Wulan Sekarsari, “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kateng Kabupaten Lombok Tengah) Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia LPPM Unisma Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia Pendahuluan” 14, no. 3 (2020): 101–16.

⁵ Rusadi Padila, (2019)

⁶ Angga Natalia, “PARADIGMA GOOD GOVERNANCE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK MEMFASILITASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TBP)” 18, no. 1 (2022): 15–26.

dan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif^{7; 8 9 10 11}. Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan kunci dalam mewujudkan RKP Desa yang berkualitas. Oleh karena itu, teori ini digunakan sebagai landasan untuk menilai sejauh mana proses penyusunan RKP Desa Jenggawah telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Perencanaan

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan langkah masa depan secara sistematis dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada tingkat desa, perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa (BPD) dan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tujuan utama proses ini adalah untuk memastikan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa secara tepat untuk mencapai sasaran pembangunan.

Perencanaan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Menurut Wiroatmodjo (2001) dalam¹² membantu pelaksanaan pembangunan agar sistematis, efisien, dalam penggunaan sumber daya, untuk meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan landasan yang jelas untuk pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program.

Menurut Permendes Nomor 21 Tahun 2020 Perencanaan dalam desa meliputi penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJM Desa sebagai rencana pembangunan jangka menengah selama enam tahun yang disusun secara partisipatif, RKP Desa sebagai rencana tahunan yang memuat program dan anggaran, serta APBDes sebagai dokumen keuangan tahunan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Ketiga dokumen ini menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pembangunan desa yang terarah, terukur, dan akuntabel.

RKP Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu satu tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pemerintah desa dalam menetapkan prioritas program, kegiatan, dan anggaran pembangunan pada tahun berjalan. Penyusunan ini dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, arah kebijakan RPJM Desa, serta kebutuhan masyarakat.

⁷ (Ardiansyar et al., 2024

⁸ Maramata et al., 2024;

⁹ Gustiani & Hertanto, 2024;

¹⁰ Pratama & Ma'ruf, 2023;

¹¹ Ariadi, 2019)

¹² Pratama & Ma'ruf, (2023)

Dokumen ini berisi rencana kegiatan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan yang difokuskan pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan memiliki arah dan tujuan yang selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengesahan RKP Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa dan menjadi dasar penyusunan APBDes sesuai dengan Permendes Nomor 21 Tahun 2020. Sehingga RKP Desa tidak hanya menjadi rencana kerja administratif, tetapi juga merupakan wujud nyata pelaksanaan pembangunan yang terarah, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa. Melalui RKP Desa, pemerintah desa dapat memastikan setiap program dan kegiatan berjalan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut ¹³ metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara langsung di lapangan, di mana peneliti bertindak sebagai instrument utama dalam melakukan pengumpulan data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Metode ini dipilih agar peneliti untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan RKP Desa Jenggawah Tahun 2024. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian berfokus pada proses perencanaan pembangunan desa melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Sampel

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang difokuskan pada satu desa, yaitu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68171. Dalam konteks studi kualitatif, sumber data primer yang menjadi fokus analisis adalah narasi verbal dan perilaku yang ditunjukkan oleh para informan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dalam penelitian ¹⁴.

Pengumpulan Data

Penelitian Data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tiga informan kunci. Wawancara dilakukan secara tatap muka kurang lebih selama ± 1 jam untuk setiap informan, menggunakan catatan dan perekam atas izin narasumber. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan sumber (informan berbeda) dan metode (wawancara, observasi, dokumentasi) sehingga data yang terkumpul lebih akurat dan menggambarkan proses penyusunan RKP Desa secara nyata.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan agar menghasilkan Kesimpulan yang sesuai dengan tujuan

¹³ Sugiyono, (2020)

¹⁴ MR Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humainika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21 (2021).

penelitian. Analisis data menurut ¹⁵ merupakan proses mengolah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang beragam dan dilakukan secara terus menerus.

Analisis data menurut Miles & Huberman (1984) dalam jurnal ¹⁶ dilakukan secara bertahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan / verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu menyaring dan merangkum data penting agar focus pada hal-hal yang relevan. Proses ini dilakukan secara berulang sehingga penyajian data yang dibutuhkan benar-benar jelas.

2. Penyajian Data

Menyajikan data yang telah diringkas dalam bentuk uraian sehingga mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi.

Menyimpulkan makna dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan bersifat sementara dan diperkuat kembali dengan data tambahan selama proses penelitian.

No	Kode	Jenis Kelamin	Posisi Informan	Deskripsi
1	PDJ1	M	Sekretaris Desa	Mengelola penyusunan RKPDes mengkoordinasikan musyawarah, mengumpulkan usulan warga, dan memastikan dokumen sesuai RPJMDes.
2	PDJ2	M	Bendahara	Mengelola keuangan RKPDes, menyusun rencana anggaran, mengatur pencairan dana, serta membuat laporan keuangan.
3	PDJ3	F	BPD	Mengawasi jalannya penyusunan RKPDes, menampung aspirasi masyarakat, dan memastikan proses berjalannya transparan dan partisipatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, memiliki potensi besar dari segi sumber daya alam, manusia, dan kelembagaan. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) menjadi penting sebagai acuan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Kajian ini menggunakan teori pelaksanaan perencanaan pembangunan dari ¹⁷ yang mencakup aspek partisipatif, transparansi, selektif, akuntabel, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

¹⁶ Janna Aulia (2024)

¹⁷ Ariadi, "PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA."

Partisipatif

Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menentukan kualitas perencanaan pembangunan desa¹⁸. Di Desa Jenggawah, masyarakat dilibatkan aktif dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Desa, Bapak Sutono, yang menyampaikan:

"Unsur masyarakat dilibatkan secara aktif terutama LPM, LKD, dan PKK. Mereka ditunjuk oleh Kepala Desa... Proses ini dibicarakan dalam Musdes yang dipimpin BPD, lalu Musrenbangdes untuk menentukan prioritas program..."

Pelibatan ini mencerminkan penerapan perencanaan partisipatif sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014. Namun, keterbatasan dana menjadi kendala utama, sehingga tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan.

"Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dana... Penyaluran aspirasi menjadi terhambat karena tidak semua usulan bisa dibiayai..."

Pemerintah desa juga membentuk Tim Penyusun RKPDes yang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan perwakilan warga miskin, untuk menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan¹⁹ bahwa keberhasilan RKPDes sangat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat.

Transparansi

Prinsip transparansi diterapkan dengan memberikan akses informasi terbuka kepada masyarakat²⁰. Menurut Ibu Evi, anggota BPD:

"RKP Desa disusun dengan transparansi... usulan masyarakat dipresentasikan di layar proyektor agar masyarakat dapat melihat langsung..."

Selain melalui forum musyawarah, transparansi juga diwujudkan dengan penggunaan situs resmi desa (<https://ppiddesa.jemberkab.go.id/desa/jenggawah>) dan pemasangan banner APBDes di kantor balai desa. Langkah ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah²¹. Dengan demikian, transparansi di Desa Jenggawah telah berjalan baik, baik dalam perencanaan maupun pelaporan keuangan.

Selektif

Sikap selektif dalam perencanaan menuntut pemerintah desa menetapkan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat²². Bendahara Desa, Bapak Nuzulul Mubarak, menyatakan:

"Kami melakukan evaluasi dari kegiatan RKPDes tahun sebelumnya. Jika ada yang belum tuntas, maka kegiatan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu..."

Prioritas utama Desa Jenggawah antara lain pembangunan kolam renang wisata desa dan jalan paving di RT 01 RW 11. Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan desa serta memperbaiki infrastruktur dasar masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan

¹⁸ Ariadi.

¹⁹ Pratama & Ma'ruf, (2023)

²⁰ Kewarganegaraan et al., (2022)

²¹ Luckytasari & Maulana, (2024)

²² Dimas Ivan et al., "Analisis Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) ANALISIS RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA GADING WATU KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 Muhammad Farid Ma ' Ruf Abstrak," 2022, 2243–56.

rasional dan terukur dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, dan kemampuan anggaran.

Akuntabel

Akuntabilitas mencakup tanggung jawab moral dan administratif atas kebijakan pembangunan²³. Pemerintah Desa Jenggawah menerapkan sistem pelaporan yang transparan melalui pembentukan tim penyusun, pelaksanaan Musdes dan Musrenbangdes, serta pelaporan anggaran secara berkala. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Sunoto:

“Semua unsur kami libatkan. Musdes menampung usulan masyarakat, dan Musrenbangdes membahas kegiatan prioritas karena dana terbatas,”.

Tahun 2024, Desa Jenggawah menerima dana sebesar Rp1,6 miliar dengan alokasi 15% untuk BLT, 3% untuk Operasional Pemerintah Desa, Ketahanan Pangan 20%, dan sisanya untuk Pemberdayaan Masyarakat serta Pembangunan Sarana Prasarana Desa. Setiap kegiatan memiliki nota pembelian dan laporan pertanggungjawaban yang diserahkan ke kecamatan dan inspektorat. Keterbatasan SDM dalam pelaporan digital (Siskeudes) menjadi tantangan, namun telah diatasi melalui pelatihan teknis²⁴.

Pemberdayaan

Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat²⁵. Contohnya, pemanfaatan lahan kosong menjadi “Bukit Nuansa Cafe” yang dikelola oleh BUMDes. Seperti pernyataan yang dikatakan oleh Ibu anggota dari BPD sebagai berikut.

“Pemberdayaan di Desa Jenggawah misalnya pengelolaan Bukit Nuansa Cafe... hasilnya masuk ke Pendapatan Asli Desa, tapi tetap memberi manfaat bagi masyarakat,”.

Program ini tidak hanya meningkatkan PADes, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Pemberdayaan ini menumbuhkan partisipasi sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus menunjukkan upaya pemerintah desa dalam menciptakan kemandirian ekonomi lokal.

Keberlanjutan

Keberlanjutan menekankan kesinambungan pembangunan dan evaluasi rutin setiap tahun²⁶. Sekretaris Desa menjelaskan:

“Kami melakukan evaluasi dari kegiatan RKPDes tahun sebelumnya. Jika ada yang belum tuntas, maka kegiatan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu...”

Keterbatasan dana menjadi tantangan utama, namun pemerintah tetap berupaya agar setiap program memiliki dampak jangka panjang. Selain itu, koordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten dilakukan agar RKPDes selaras dengan RPJMDes dan kebijakan daerah. Berikut adalah pernyataan dari Sekretaris Desa mengenai hal tersebut:

²³ Anirwan and Irwansyah, “VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN MANAGEMENT” 2, no. 1 (2022): 56–68.

²⁴ Pratama and Ma'ruf, “Analisis Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2022”; Ivan et al., “Analisis Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) ANALISIS RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA GADING WATU KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 Muhammad Farid Ma ' Ruf Abstrak.”

²⁵ Ivan et al., “Analisis Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) ANALISIS RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA GADING WATU KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 Muhammad Farid Ma ' Ruf Abstrak.”

²⁶ Ivan et al.

"Kami melakukan koordinasi antara desa dan kecamatan... pihak kecamatan memberikan pembinaan dan arahan,".

Dengan demikian, keberlanjutan di Desa Jenggawah telah terwujud melalui evaluasi rutin, seleksi program sesuai kapasitas dana, dan kerja sama lintas pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) di Desa Jenggawah telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, selektif, akuntabel, berorientasi pada pemberdayaan, serta berkelanjutan. Masyarakat telah dilibatkan dalam Musyawarah Desa dan Musrenbangdes untuk menyampaikan aspirasi, meskipun keterbatasan dana masih menjadi kendala utama. Pemerintah desa juga telah menunjukkan keterbukaan informasi melalui forum musyawarah, situs resmi desa, dan papan pengumuman. Dalam penentuan prioritas program, pemerintah bersikap selektif dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, dan kemampuan anggaran.

Akuntabilitas telah diterapkan melalui pelaporan kegiatan dan penggunaan dana yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait. Program pemberdayaan, seperti pengelolaan Bukit Nuansa Cafe oleh BUMDes, menjadi bukti nyata optimalisasi potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membuka lapangan kerja. Selain itu, keberlanjutan pembangunan dijaga melalui evaluasi tahunan agar kegiatan yang belum terselesaikan dapat dilanjutkan pada periode berikutnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan RKPDDes Desa Jenggawah telah sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014, meskipun masih perlu peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas aparatur desa.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keterlibatan Warga dalam Musdes dan Musrenbangdes
Berdasarkan studi ²⁷ dan ²⁸, rendahnya keterlibatan masyarakat dapat mengakibatkan program RKPDDes tidak mengenai sasaran. Keadaan ini sejalan dengan penemuan di Desa Jenggawah yang menerima banyak usulan namun tidak semuanya dapat diakomodasi akibat keterbatasan dana. Oleh sebab itu, diperlukan adanya forum pra-musdes, distribusi undangan yang lebih meluas hingga tingkat RT/RW, serta penyediaan saluran aspirasi daring untuk memastikan perencanaan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi RKPDDes dan APBDes
Studi oleh ²⁹ mengungkapkan bahwa transparansi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan dan pengawasan masyarakat. Ini sesuai dengan keadaan Desa Jenggawah yang telah transparan, tetapi masih perlu memperbaiki pembaruan informasi digital. Pemerintah desa dianjurkan untuk memperbaharui website desa secara berkala, mengunggah dokumen RKPDDes dan realisasi

²⁷ Rahmadya & Sugiri (2022)

²⁸ Pratama & Ma'ruf, (2023)

²⁹ Gustiani & Hertanto (2024)

anggaran, serta memanfaatkan media sosial sebagai alat publikasi perkembangan kegiatan.

3. Membangun Sistem Pemantauan dan Penilaian (Monev) yang Terencana. Menurut penelitian ³⁰, ketidakberdayaan sistem evaluasi mengakibatkan program desa sulit untuk diukur tingkat keberhasilannya. Situasi ini berkaitan dengan keadaan Desa Jenggawah yang masih menghadapi program yang tertunda dan adanya keterbatasan dana. Desa harus menentukan indikator pencapaian untuk setiap kegiatan, melaksanakan evaluasi setiap tiga bulan, serta melibatkan BPD dan masyarakat dalam audit sosial supaya keberlanjutan program dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anirwan, and Irwansyah. "VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN MANAGEMENT" 2, no. 1 (2022): 56–68.
- Ardiansyar, Saemu Alwi, and Ilyas. "ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH" 9 (2024): 1–8.
- Ariadi, A. "PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA." *Meraja Journa*; 2 (2019): 135–47.
- Fadli, MR. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humainika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21 (2021).
- Gustiani, Riska, and Hertanto. "IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA" 7 (2024): 416–22.
- Ivan, Dimas, Cahilla Pratama, S Ilmu, Administrasi Negara, Fakultas Ilmu, and Universitas Negeri Surabaya. "Analisis Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) ANALISIS RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA GADING WATU KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 Muhammad Farid Ma ' Ruf Abstrak," 2022, 2243–56.
- Janna Aulia. "IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA: PENINGKATAN KINERJA APARATUR DESA KAMBINGAN BARAT KABUPATEN SUMENEP" 9, no. April (2024): 37–52.
- Kalam, Kowam Syaiful. "Monitoring Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kasesirejo Kecamatan Bodeh," 2023.
- Kewarganegaraan, Jurnal, Hanina Nafisa Azka, Fatma Ulfatun Najicha, Prodi Informatika, Universitas Sebelas Maret, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Sebelas Maret. "Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel" 6, no. 1 (2022): 597–602.
- Luckytasari, V A, and A Maulana. "Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 12 (2024): 1–11.
- Maramata, Aji Safawalina, Ovie Vernanda, Nabilla Aliya, Putri Novitasari, Fika Amin, Siti Aisyah, Siti Nur Indri, and Muhammad Tadhi Viki. "KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dan" 1, no. 4 (2024): 189–94.
- Natalia, Angga. "PARADIGMA GOOD GOVERNANCE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK MEMFASILITASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN

³⁰ Kalam (2023)

- BERKELANJUTAN (TBP)” 18, no. 1 (2022): 15–26.
- Pratama, Dimas Ivan Cahilla, and Muhammad Farid Ma’ruf. “Analisis Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2022.” *Publika*, 2023, 2243–56. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2243-2256>.
- Rahmadya, Salma Dzalika, and Dani Sugiri. “Efektivitas Musrenbangdes Dalam Penyusunan RKPD: Studi Kasus Pada Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung” 5, no. 2 (2022): 53–59. <https://doi.org/10.35326/jiam.v5i2.1281>.
- Rusadi Padila, Adlin. “Pelaksanaan Good Governance Dalam Penyusunan RKP Desa Di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Dan 2019.” *Jom Fisip* 7 (2019): 1–16.
- Setiawan, I Made Hendra, and Ni Ketut Rasmini. “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Pegawai Pada Kualitas Laporan Keuangan.” *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 5 (2021): 1331. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p19>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Supardi. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, 2023.
- Suryaman, Lalu Maman, Slamet Muchsin, and Retno Wulan Sekarsari. “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kateng Kabupaten Lombok Tengah) Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia LPPM Unisma Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia Pendahuluan” 14, no. 3 (2020): 101–16.
- Anirwan, and Irwansyah. “VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN MANAGEMENT” 2, no. 1 (2022): 56–68.
- Ardiansyar, Saemu Alwi, and Ilyas. “ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH” 9 (2024): 1–8.
- Ariadi, A. “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.” *Meraja Journa*; 2 (2019): 135–47.
- Fadli, MR. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humainika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21 (2021).
- Gustiani, Riska, and Hertanto. “IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA” 7 (2024): 416–22.
- Ivan, Dimas, Cahilla Pratama, S Ilmu, Administrasi Negara, Fakultas Ilmu, and Universitas Negeri Surabaya. “Analisis Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) ANALISIS RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA GADING WATU KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 Muhammad Farid Ma ’ Ruf Abstrak,” 2022, 2243–56.
- Janna Aulia. “IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA: PENINGKATAN KINERJA APARATUR DESA KAMBINGAN BARAT KABUPATEN SUMENEP” 9, no. April (2024): 37–52.
- Kalam, Kowam Syaiful. “Monitoring Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kasesirejo Kecamatan Bodeh,” 2023.
- Kewarganegaraan, Jurnal, Hanina Nafisa Azka, Fatma Ulfatun Najicha, Prodi Informatika, Universitas Sebelas Maret, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Sebelas Maret. “Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai

- Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel” 6, no. 1 (2022): 597–602.
- Luckytasari, V A, and A Maulana. “Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 12 (2024): 1–11.
- Maramata, Aji Safawalina, Ovie Vernanda, Nabilla Aliya, Putri Novitasari, Fika Amin, Siti Aisyah, Siti Nur Indri, and Muhammad Tadhi Viki. “KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dan” 1, no. 4 (2024): 189–94.
- Natalia, Angga. “PARADIGMA GOOD GOVERNANCE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK MEMFASILITASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TBP)” 18, no. 1 (2022): 15–26.
- Pratama, Dimas Ivan Cahilla, and Muhammad Farid Ma’ruf. “Analisis Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2022.” *Publika*, 2023, 2243–56. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2243-2256>.
- Rahmadya, Salma Dzalika, and Dani Sugiri. “Efektivitas Musrenbangdes Dalam Penyusunan RKPD: Studi Kasus Pada Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung” 5, no. 2 (2022): 53–59. <https://doi.org/10.35326/jiam.v5i2.1281>.
- Rusadi Padila, Adlin. “Pelaksanaan Good Governance Dalam Penyusunan RKP Desa Di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Dan 2019.” *Jom Fisip* 7 (2019): 1–16.
- Setiawan, I Made Hendra, and Ni Ketut Rasmini. “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Pegawai Pada Kualitas Laporan Keuangan.” *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 5 (2021): 1331. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p19>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Supardi. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, 2023.
- Suryaman, Lalu Maman, Slamet Muchsin, and Retno Wulan Sekarsari. “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kateng Kabupaten Lombok Tengah) Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia LPPM Unisma Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia Pendahuluan” 14, no. 3 (2020): 101–16.